

Implementasi Peran dan Tugas Komite Sekolah di SMA Negeri Kabupaten Limapuluh Kota

Yusra Defawati^{1*}, Akhyar Hanif², David³, Sirajul Munir⁴, Muhammad Fazis⁵, Asmendri⁶

¹SMA N 1 Harau dan UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

^{2,3,4,5,6}UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

*Corresponding author: ysrdfwti@gmail.com

Abstract : Education and learning require collaboration from various aspects, including the involvement of school committees as community representatives in education. The law of education mandates active roles of school committees in improving educational services in schools. However, there are still various problems in implementing the roles and duties of school committees, including constraints in empowerment that still need to be optimally fulfilled in the functions and roles in schools. This research aims to analyze the extent to which the implementation of roles and duties of school committees in Senior High Schools in Limapuluh Kota Regency. The type of research method used is quantitative descriptive with a survey method. This research was conducted at Senior Senior High Schools in Limapuluh Kota Regency, with a sample size of 251 teachers as respondents. Data was collected using a questionnaire instrument while the Aiken and the Construct Validity test using Product Moment Correlation. The reliability test was checked using Alpha Cronbush and the technique of data analysis used descriptive statistical methods, specifically calculating percentages based on the data measured using the Likert scale. Based on the research, data were obtained for the four roles of school committees that can be measured numerically. The school committee has proper roles in fulfilling the responsibility as an advisory agency, a supporting agency, a controlling agency, and a mediator agency. The results of this study indicate that the roles and duties of the school committee in Senior High School in Kabupaten Limapuluh Kota already perform good responsibilities. However, there is still a need for efforts to strengthen and enhance the roles and duties of the school committee in Senior High Schools in Limapuluh Kota Regency.

Keywords : committee roles; committee duties.

Abstrak : Pendidikan dan pembelajaran membutuhkan kolaborasi dari berbagai aspek, termasuk keterlibatan komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat dalam pendidikan. Undang-undang pendidikan mewajibkan peran aktif komite sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan di sekolah. Namun, masih terdapat berbagai masalah dalam mengimplementasikan peran dan tugas komite sekolah, termasuk kendala dalam pemberdayaan yang belum optimal dalam fungsi dan peranannya di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa baik implementasi peran dan tugas komite sekolah di SMAN Kabupaten Limapuluh Kota. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri di Kabupaten Limapuluh Kota dengan sampelnya adalah guru yang berjumlah 251 responden. Pengumpulan data menggunakan instrumen berupa Angket dengan uji validitas isi menggunakan Uji Aiken dan Uji validitas Konstruk Product Moment Correlation, sedang uji reliabelitas menggunakan Alpha Cronbush dan teknik analisa data menggunakan metode statistik deskriptif berupa presentase dari data yang diukur dengan acuan Likert. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan data dari keempat peran komite sekolah yang dapat diukur secara numerik. Komite sekolah memiliki peranan yang baik untuk keempat peran tersebut yaitu sebagai advisor agency, sebagai supporting agency, sebagai controlling agency, dan sebagai mediator agency. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan tugas komite sekolah di

SMA Negeri Kabupaten Limapuluh Kota sudah baik, namun masih perlu dilakukan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan peran dan tugas komite sekolah di SMA Negeri Kabupaten Limapuluh Kota.

Kata kunci : peran komite; tugas komite.

Copyright (c) 2024 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Received: 04-12-2023

Revised: 09-12-2023

Accepted: 14-12-2023

Published: 21-12-2023

PENDAHULUAN

Pendidikan dan pembelajaran merupakan dua faktor utama yang menjadi sentra dibidang pendidikan formal, informal, atau nonformal yang pengelolaannya membutuhkan kerjasama/kolaborasi dari berbagai aspek, baik intern maupun ekstern. Salah satunya adalah keterlibatan masyarakat sebagai bagian yang terlibat langsung di dalamnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh (Nasional, 2003) “Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pengajaran”. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa “Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan melibatkan individu atau sekelompok individu yang berperan serta aktif mengelola serta mengawasi kualitas layanan Pendidikan, selanjutnya “Perubahan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya dalam kewenanga akademik akan tetapi juga dalam pola kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua dan masyarakat” . Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa peran serta masyarakat ikut menentukan mutu dan kualitas Pendidikan.

Banyak hal yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya kualitas lembaga pendidikan yang masih dibawah Standar Nasional terutama kualitas layanan pendidikan di sekolah yang belum sesuai dengan kebijakan Pendidikan Nasional (Indonesia, 2003). Pengajaran dan pendidikan berkualitas akan mengutamakan layanan untuk memenuhi kepuasan stakeholder seperti siswa, wali murid dan warga masyarakat sebagai mitra sekolah. Dimana dalam pelaksanaannya melibatkan warga sekolah bersama dengan komite sekolah. Hal ini merupakan suatu wujud realisasi otonomi Pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik yang mewadahi pandangan, aspirasi, dan menggali sumbangan masyarakat yang demokratis, transparan dan akuntabel.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan peran komite sekolah, pasal 56 di sebutkan bahwa: “Komite sekolah merupakan badan independen yang berperan dalam meningkatkan layanan pendidikan dan pengajaran dengan cara memberikan dukungan, saran dan pertimbangan serta pengawasan pada satuan

pendidikan”. Komite sekolah memegang amanat undang-undang untuk ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai fungsi dan tugasnya. Dimana menurut Hendriani Suswanti fungsinya adalah sebagai pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan bermutu.

Peran komite sebagai *Supporting agency* tidak terbatas pada pemberian dukungan, motivasi serta arahan tetapi aktif berpartisipasi memberikan kesadaran kepada orang tua untuk dapat aktif terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Sebagai *Supporting agency* maka komite bisa memberikan dorongan dan membangun kesadaran para orang tua/wali murid dan masyarakat agar turut serta berpartisipasi mengelola pendidikan (Nasution, 2007). Dengan kolaborasi yang solid antara komite sekolah, tokoh-tokoh masyarakat beserta *stakeholdernya* maka dilema yang dihadapi saat ini akan dapat ditanggulangi dengan tepat dan efisien hendaknya.

Adanya beberapa peran komite sekolah yang dapat dilakukan di sekolah yaitu: memberikan bantuan pelaksanaan program sekolah, sumbangan pemikiran dan saran terhadap berbagai hal demi kemajuan sekolah, ikut serta membangun iklim suasana kondusif untuk peserta didik dengan menyediakan dan membuat aman, nyaman fasilitas di sekolah, melaksanakan peninjauan terhadap sekolah, serta memberikan dorongan kepada murid, meningkatkan profesionalisme dari guru, meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, ikut melaksanakan monitoring proses belajar di sekolah dan mencari solusi dalam pembiayaan pengelolaan sekolah, ikut dalam menyusun kurikulum untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, memberikan fasilitas pada kegiatan sekolah yang bernilai manfaat, membantu melaksanakan program belajar di luar kelas/sekolah untuk siswa secara periodik.

Berdasarkan hasil pengamatan awal dengan beberapa kepala sekolah dan wakil kurikulum SMA Negeri yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota ada beberapa hal yang tampak dari pemberdayaan komite sekolah dalam peran dan tugasnya di sekolah yaitu melakukan rapat rutin dengan dewan guru, menggalang sumber dana pendukung dari donator, memonitor jalannya program-program sekolah yang sudah dianggarkan. Adapun tugas komite yang seharusnya yaitu memberikan saran dan pertimbangan dalam setiap kebijakan pendidikan, mencari dan mengumpulkan dana dan sumber daya Pendidikan,

melakukan kegiatan monitoring terhadap layanan pendidikan di Sekolah dan melakukan tindak lanjut terhadap ketidakpuasan layanan pendidikan dari semua stakeholder dan pengamatan komite sekolah terhadap kinerja guru dan kepala sekolah.

Hal ini juga menjadi temuan dari beberapa penelitian berikut ini, diantaranya:

1. Endang Sri Budi Herawati, 2021. *School Committee Support for Improving the Quality of Education Services*. Hasil penelitian menunjukkan peran komite sekolah sudah berjalan secara optimal, akan tetapi dalam memberikan dukungan yang positif untuk meningkatkan mutu Pendidikan belum terlaksana dengan baik.
2. Ismail,dkk (2021). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu Pendidikan di SD Negeri Kongbeng Kaltim. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dan dukungan dalam setiap tahapan kegiatan di sekolah sudah berjalan dengan baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi perannya dalam pengontrolan dan keterbukaan penggunaan keuangan alokasi dana Pendidikan agar nanti dapat dipertanggungjawabkan.
3. Agus Setiawan, 2019. Peran komite sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Magelang. Penelitian ini menitikberatkan pada pengoptimalan peran yang telah ditetapkan dalam Kepmendikbud RI No. 44/UU/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dimana Stakeholder sekolah mengupayakan peningkatan peran komite sekolah sebagai pendukung, pemberi pertimbangan, pengontrol, dan melayani serta menerima ide-ide atau saran di SMP N 6 Kota Magelang.

Berbagai hambatan yang muncul dari partisipasi komite sekolah sebagai organisasi mitra bagi sekolah dari empat penelitian terdahulu di atas, dimana komite sekolah berperan dalam pelayanan dan penentuan kebijakan sekolah belum berjalan secara optimal, begitu juga dalam hal penambahan anggaran pendapatan sekolah dan pengawasan. Selanjutnya dalam menanggapi keluhan, saran, kritik dan usulan dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil observasi komite sekolah terhadap kinerja sekolah baik dalam pengontrolan pendanaan maupun dalam layanan mutu pendidikan.

Berdasarkan hal yang diuraikan penulis ingin meneliti sejauh mana a peran komite yang dijabarkan dalam tugas-tugas telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Keputusan Mendikbud sebagai mitra bagi sekolah Negeri maupun Swasta dan didukung oleh beberapa pendapa para ahli baik sebagai *Advisator Agency*, *Supporting Agency*,

Monitoring Agency, dan Meditaor Agency . Penelitian ini penulis lakukan pada SMA Negeri di Kabupaten Limapuluh Kota yang berjumlah sebanyak 16 sekolah.

METODE

Adapun jenis dari penelitian deskriptif kuantitatif dimana dalam pengambilan data menggunakan metode survei. Dalam penelitian ini langkah-langkah yang akan di lakukan adalah melaksanakan survei terhadap sampel untuk memperoleh gambaran sikap, perilaku atau tanggapan responden. Berdasarkan hasil survei ini, peneliti membuat argumen tentang tren populasi. Penelitian ini dilaksanakan di 16 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota. Enam belas SMA Negeri tersebut menyebar di semua kecamatan yang berada di Kabupatem Limapuluh Kota. Lokasi 16 SMA Negeri.

Di dalam penelitian ini sumber data penelitian adalah guru di SMA Negeri Kabupaten Limapuluh Kota yang berjumlah 542 orang dari 16 SMA Negeri. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasi, karena di dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah guru-guru SMA yang terlibat bersama komite sekolah baik langsung maupun tidak maka teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling yaitu teknik penentuan sampel secara acak (Kuantitatif, 2016).

Adapun Untuk dapat menentukan jumlah sampel penelitian, dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan keterangan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(\mu)^2}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

μ : *margin of error* (5%)

Dengan menggunakan rumus tersebut di atas diperoleh jumlah sampel sebanyak:

$$n = \frac{N}{1 + N(\mu)^2}$$

$$n = \frac{542}{1 + 542(0,05)^2}$$

$$n = \frac{542}{1 + 542(0,0025)}$$

$$n = 230$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 251 orang.

Penelitian ini menggunakan kuesioner berupa pernyataan tertulis kepada responden. Instrumen atau angket disusun dalam bentuk skala likert. Alternatif jawaban diberikan pada angket peran komisi: sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (R), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Pernyataan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, 1 dan pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kegiatan uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan setelah instrumen penilaian disebar.

Instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, alat penelitian ini dapat berupa angket, formulir observasi, bentuk lain yang berhubungan dengan pengumpulan data dan sebagainya. Untuk Teknik analisis data metoda statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh hasil rerata dan prosentase dari data, dimana cara menganalisis data hasil survei dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Likert

Jawaban	Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Sugiyono:2012)

Rumus Rentang skala:

$$RS = \frac{m - n}{b}$$

RS = rentang skala penilaian

m = skor tertinggi pada skala

n = skor terendah pada skala

b = jumlah kelas atau kategori yang dibuat

Rumus rentang skala digunakan untuk menentukan posisi responden sampel dengan rumus sebagai berikut:

$$RS = \frac{m-1}{m}$$

Keterangan:

Rs = rentang skala penelitian

m = banyaknya kategori

Skor terbesar adalah 5 dan skor terkecil adalah 1, jumlah kelas atau kategori 5, maka dapat ditentukan rentang skalanya sebagai berikut :

$$RS = \frac{5-1}{5} = 0.8$$

Dengan rentang skala 0,8 untuk *five point Linkert scale*, maka jumlah linier numerik yang dipakai adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rentang Skala kategori jawaban

No	Rentang Skala	Kategori
1	1.00 – 1.80	Relative Tidak Setuju
2	1.81 – 2.60	Tidak setuju
3	2.61 – 3.40	Netral
4	3.41 – 4.20	Setuju
5	4.21 – 5.00	Relative Sangat Setuju

Sumber: Sugiyono (2018, p. 132)

Untuk mengetahui karakteristik responden digunakan rumus:

$$p = \frac{f_i}{\sum f_i} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase dari responden yang memiliki kategori tertentu

f_i = Banyaknya responden yang menjawab satu jenis jawaban tertentu

∑f_i = Jumlah total responden

Untuk menentukan tingkat rata rata di gunakan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{n}$$

Keterangan:

\bar{X} = skor rata-rata

f_i = frekuensi pemilihan nilai

x_i = skor 1,2,3,4,5

n = jumlah yang digunakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di 16 SMA Negeri yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 20 Januari sampai 20 Februari 2023. Hasil penelitian ini meliputi empat aspek peran dan tugas komite sekolah yaitu sebagai *Advisor Agency*, *Supporting Agency*, *Controlling Agency*, dan *Mediator Agency*. Data untuk keempat aspek peran komite sekolah ini diperoleh dari hasil lembar angket terhadap implementasi peran dan tugas komite sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota, dimana analisis data dikelompokkan pada total respon sumber data dan total respon sumber data tiap sekolah.

Berikut disajikan table 21 yang digunakan untuk melakukan penilaian dari keempat peran komite sekolah.

Tabel 3. Kriteria Penilaian

Persentase (%)	Kategori
81 – 100	Sangat Baik
61 – 80	Baik
41 – 60	Cukup Baik
21 – 40	Kurang Baik
0 – 20	Sangat Kurang Baik

(modifikasi dari Arikunto dan Cepi, 2010)

Penjelasan hasil penelitian untuk masing-masing aspek komite sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut.

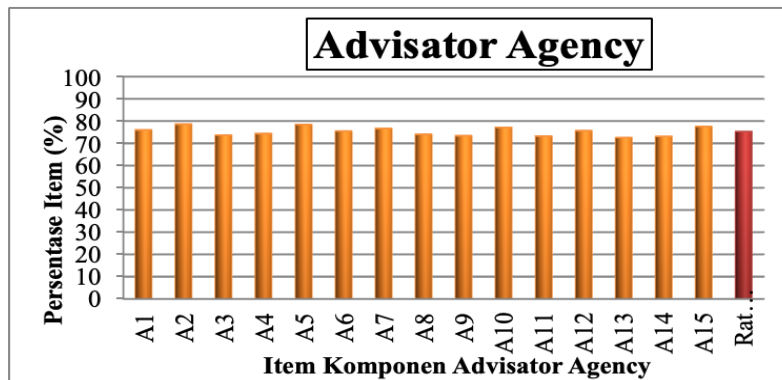
1. Komite Sekolah sebagai *Advisor Agency*

Hasil penelitian implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *advisor agency* diperoleh dari hasil lembar angket yang disebarakan. Lembar angket disebarakan kepada 16 SMA Negeri yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Peran komite sebagai *advisor agency* maksudnya adalah komite sekolah memiliki peran untuk memberikan nasehat ataupun pertimbangan terhadap kebijakan yang akan di ambil sekolah demi kesuksesan dan meningkatkan mutu suatu sekolah.

Ada lima belas item yang dinilai dari peran komite sekolah sebagai *advistor agency* pada penilitian ini. Lima belas item tersebut yaitu komite sekolah memberikan masukan kepada sekolah dalam perancangan program pendidikan (A1), komite

sekolah memberikan masukan perancangan RAPBS (A2), komite sekolah memberikan masukandalam perancangan kriteria kinerja *stakeholder* sekolah (A3), komite sekolah memberikan masukan dalam ketenagaan pendidikan sekolah (A4), komite sekolah memberikan masukan dalam fasilitas pendidikan di sekolah (A5), komite sekolah memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam perancangan program pendidikan (A6), komite sekolah memberikan pertimbangan perancangan RAPBS (A7), komite sekolah memberikan pertimbangan dalam perancangan kriteria kinerja *stakeholder* sekolah (A8), komite sekolah memberikan pertimbangan dalam ketenagaan pendidikan sekolah (A9), komite sekolah memberikan pertimbangan dalam fasilitas pendidikan di sekolah (A10), komite sekolah memberikan rekomendasi kepada sekolah dalam perancangan program pendidikan (A11), komite sekolah memberikan rekomendasi dalam perancangan RAPBS (A12), komite sekolah memberikan rekomendasi dalam perancangan kriteria kinerja *stakeholder* sekolah (A13), komite sekolah memberikan rekomendasi dalam ketenagaan pendidikan di sekolah (A14), komite sekolah memberikan rekomendasi dalam fasilitas pendidikan di sekolah (A15).

Hasil plot data dari kelima belas item peran komite sekolah sebagai *advisor agency* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Analisis Peran Komite Sekolah Sebagai *Advisor Agency*

Berdasarkan analisis data pada Gambar 1, dapat dikemukakan penilaian para guru terhadap implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *advisor agency*. Persentase peran komite sekolah peritem dilihat dari gambar tidak menunjukkan hasil yang signifikan berbeda. Persentase item 1 (A1) sebesar 76,00% dengan kategori baik. Persentase item 2 (A2) sebesar 78,61% dengan kategori baik. Persentase item 3 (A3) sebesar 73,71% dengan kategori baik. Persentase item 4 (A4) sebesar 74,37% dengan

kategori baik. Persentase item 5 (A5) sebesar 78,45% dengan kategori baik. Persentase item 6 (A6) sebesar 75,51% dengan kategori baik. Persentase item 7 (A7) sebesar 76,65% dengan kategori baik. Persentase item 8 (A8) sebesar 74,04% dengan kategori baik. Persentase item 9 (A9) sebesar 73,39% dengan kategori baik. Persentase item 10 (A10) sebesar 77,14% dengan kategori baik. Persentase item 11 (A11) sebesar 73,22% dengan kategori baik. Persentase item 12 (A12) sebesar 75,67%. Persentase item 13 (A13) sebesar 72,57% dengan kategori baik. Persentase item 14 (A14) sebesar 73,14% dengan kategori baik. Persentase item 15 (A15) sebesar 77,55% dengan kategori baik. Dari kelima belas item tersebut didapatkan rata-rata persentase peran komite sekolah sebagai *advisor agency* sebesar 75,33% dalam kategori baik.

Persentase tertinggi dari peran komite sekolah sebagai *advisor agency* terletak pada item A5 yaitu komite sekolah memberikan masukan dalam fasilitas pendidikan di sekolah, dan persentase terendah pada item A13 yaitu komite sekolah memberikan rekomendasi dalam perancangan kriteria kinerja *stakeholder* sekolah. Namun, dari kedua item ini masih dalam kategori baik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah sebagai *advisor agency* memiliki implementasi peran dan tugas yang baik di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota.

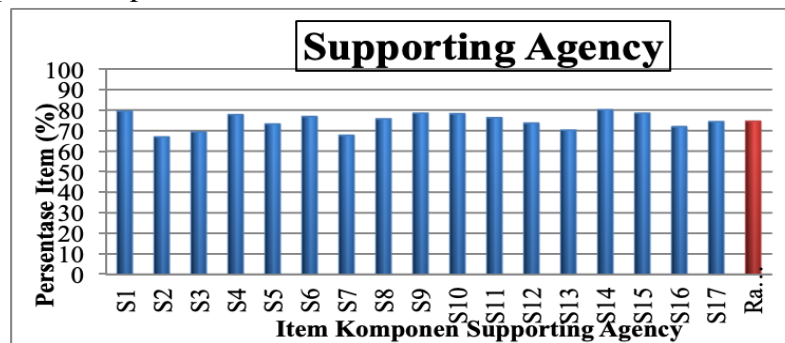
2. Komite Sekolah sebagai *Supporting Agency*

Hasil penelitian implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *Supporting Agency* diperoleh dari hasil lembar angket yang disebarkan. Lembar angket disebarkan kepada 16 SMA Negeri yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Peran komite sebagai *Supporting Agency* maksudnya adalah komite sekolah memiliki peran sebagai pendukung dalam bentuk bantuan finansial, pemikiran, ataupun tenaga yang dapat disumbangkan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu suatu sekolah.

Ada tujuh belas item yang dinilai dari peran komite sekolah sebagai *supporting agency* pada penelitian ini. Tujuh belas item tersebut yaitu komite sekolah mengadakan rapat rutin dengan orang tua (S1), komite sekolah mengadakan rapat rutin dengan masyarakat (S2), komite sekolah mencari bantuan dana dari berbagai pihak (S3), komite sekolah melibatkan orang tua dalam kegiatan di sekolah (S4), komite sekolah melibatkan masyarakat dalam kegiatan di sekolah (S5), komite sekolah memberikan dukungan untuk kegiatan sosial di sekolah (S6), komite sekolah memberikan bantuan dana dari dunia industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal

dari keluarga tidak mampu (S7), komite sekolah memverifikasi RAPBS yang diajukan sekolah (S8), komite sekolah mengesahkan RAPBS (S9), komite sekolah mengesahkan RAPBS (S10), komite sekolah memotivasi orang tua siswa untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan (S11), komite sekolah memotivasi masyarakat untuk meningkatkan komitmen bagi upaya peningkatkan mutu pendidikan (S12), komite sekolah membantu sekolah dalam rangka penggalangan dana masyarakat (S13), komite sekolah melakukan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa (S14), komite sekolah membantu sekolah dalam menciptakan hubungan kerjasama antara sekolah dengan orang tua (S15), komite sekolah mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan komitmen sekolah dalam menciptakan hubungan dengan orang tua dan masyarakat (S16), komite sekolah mengelola kontribusi masyarakat yang diberikan kepas sekolah (S17).

Hasil plot data dari ketujuh belas item peran komite sekolah sebagai *supporting agency* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Analisis Peran Komite Sekolah Sebagai *supporting agency*

Berdasarkan analisis data pada Gambar 2, dapat dikemukakan penilaian para guru terhadap implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *supporting agency*. Persentase peran komite sekolah peritem dilihat dari gambar tidak menunjukkan hasil yang signifikan berbeda. Persentase item 1 (S1) sebesar 79,51% dengan kategori baik. Persentase item 2 (S2) sebesar 66,94% dengan kategori baik. Persentase item 3 (S3) sebesar 69,31% dengan kategori baik. Persentase item 4 (S4) sebesar 74,78% dengan kategori baik. Persentase item 5 (S5) sebesar 73,22% dengan kategori baik. Persentase item 6 (S6) sebesar 76,82% dengan kategori baik. Persentase item 7 (S7) sebesar 67,67% dengan kategori baik. Persentase item 8 (S8) sebesar 75,67% dengan kategori baik. Persentase item 9 (S9) sebesar 78,45% dengan kategori baik. Persentase item 10

(S10) sebesar 78,20% dengan kategori baik. Persentase item 11 (S11) sebesar 76,24% dengan kategori baik. Persentase item 12 (S12) sebesar 73,63%. Persentase item 13 (S13) sebesar 70,29% dengan kategori baik. Persentase item 14 (S14) sebesar 80,16% dengan kategori baik. Persentase item 15 (S15) sebesar 78,45% dengan kategori baik. Persentase item 16 (S16) sebesar 71,92% dengan kategori baik. Persentase item 17 (S17) sebesar 74,37% dengan kategori baik. Dari ketujuh belas item tersebut didapatkan rata-rata persentase peran komite sekolah sebagai *supporting agency* sebesar 74,63% dalam kategori baik.

Persentase tertinggi dari peran komite sekolah sebagai *supporting agency* terletak pada item S14 yaitu komite sekolah melakukan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa, dan persentase terendah pada item S2 yaitu komite sekolah mengadakan rapat rutin dengan masyarakat. Namun, dari kedua item ini masih dalam kategori baik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah sebagai *supporting agency* memiliki implementasi peran dan tugas yang baik di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota.

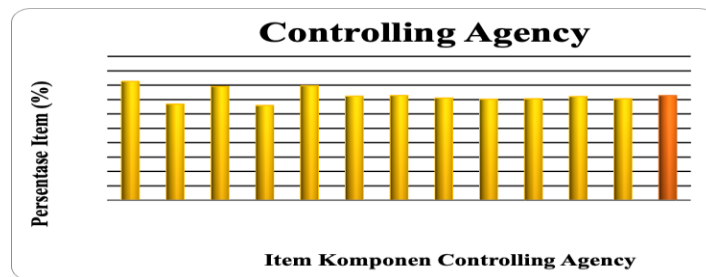
3. Komite Sekolah sebagai *Controlling Agency*

Hasil penelitian implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *Controlling Agency* diperoleh dari hasil lembar angket yang disebarkan. Lembar angket disebarkan kepada 16 SMA Negeri yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Peran komite sebagai *Controlling Agency* maksudnya adalah komite sekolah memiliki peran sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan sekolah.

Ada dua belas item yang dinilai dari peran komite sekolah sebagai *controlling agency* pada penelitian ini. Dua belas item tersebut yaitu komite sekolah mengadakan rapat secara rutin dengan kepala sekolah (C1), komite sekolah mengadakan rapat secara rutin dengan dewan guru (C2), komite sekolah mengadakan rapat secara insidental dengan kepala sekolah (C3), komite sekolah mengadakan rapat secara insidental dengan dewan guru (C4), komite sekolah saling mengadakan silaturahmi dengan sekolah (C5), komite sekolah meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa (C6), komite sekolah bekerjasama dengan sekolah dalam penelusuran alumni (C7), komite sekolah memberdayakan alumni untuk membantu kegiatan sekolah (C8), komite sekolah melakukan kajian program sekolah terhadap *stakeholder* sekolah secara periodik (C9), komite sekolah menyampaikan hasil kajian program

sekolah terhadap *stakeholder* sekolah secara periodik (C10), komite sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa dana atau non dana kepada masyarakat (C11), komite sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa dana atau non dana kepada pemerintah setempat (C12).

Hasil plot data dari ketujuh belas item peran komite sekolah sebagai *controlling agency* dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil Analisis Peran Komite Sekolah Sebagai *Controlling Agency*

Berdasarkan analisis data pada Gambar 3, dapat dikemukakan penilaian para guru terhadap implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *controlling agency*. Persentase peran komite sekolah peritem dilihat dari gambar tidak menunjukkan hasil yang signifikan berbeda. Persentase item 1 (C1) sebesar 82,61% dengan kategori sangat baik. Persentase item 2 (C2) sebesar 66,86% dengan kategori baik. Persentase item 3 (C3) sebesar 79,10% dengan kategori baik. Persentase item 4 (C4) sebesar 65,88% dengan kategori baik. Persentase item 5 (C5) sebesar 79,59% dengan kategori baik. Persentase item 6 (C6) sebesar 72,33% dengan kategori baik. Persentase item 7 (C7) sebesar 72,82% dengan kategori baik. Persentase item 8 (C8) sebesar 71,10% dengan kategori baik. Persentase item 9 (C9) sebesar 70,29% dengan kategori baik. Persentase item 10 (C10) sebesar 70,53% dengan kategori baik. Persentase item 11 (C11) sebesar 72,08% dengan kategori baik. Persentase item 12 (C12) sebesar 70,53%. Dari kedua belas item tersebut didapatkan rata-rata persentase peran komite sekolah sebagai *controlling agency* sebesar 72,81% dalam kategori baik.

Persentase tertinggi dari peran komite sekolah sebagai *controlling agency* terletak pada item C1 yaitu komite sekolah mengadakan rapat secara rutin dengan kepala sekolah, dan persentase terendah pada item C4 yaitu komite sekolah mengadakan rapat secara insidental dengan dewan guru. Namun, dari kedua item ini masih dalam kategori baik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah sebagai *controlling*

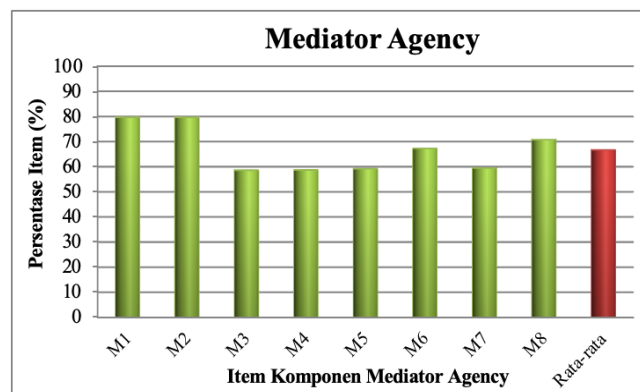
agency memiliki implementasi peran dan tugas yang baik di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota.

4. Komite Sekolah sebagai *Mediator Agency*

Hasil penelitian implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *Mediator Agency* diperoleh dari hasil lembar angket yang disebar. Lembar angket disebar kepada 16 SMA Negeri yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Peran komite sebagai *Mediator Agency* maksudnya adalah komite sekolah memiliki peran sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat, termasuk pemerintahan dan dunia usaha/ dunia industri.

Ada delapan item yang dinilai dari peran komite sekolah sebagai *mediator agency* pada penelitian ini. Delapan item tersebut yaitu komite sekolah membina hubungan dengan seluruh *stakeholder* sekolah (M1), komite sekolah membina kerjasama harmonis dengan seluruh *stakeholder* sekolah (M2), komite sekolah mengadakan peninjauan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan MOU dengan berbagai lembaga (M3), komite sekolah menyebarkan angket untuk memperoleh aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat (M4), komite sekolah menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat (M5), komite sekolah menyampaikan usul kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan sekolah (M6), komite sekolah menganalisis berbagai kebutuhan pendidikan (M7), komite sekolah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan sekolah (M8).

Hasil plot data dari kedelapan item peran komite sekolah sebagai *mediator agency* dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil Analisis Peran Komite Sekolah Sebagai *Mediator Agency*

Berdasarkan analisis data pada Gambar 4, dapat dikemukakan penilaian para guru terhadap implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *mediator agency*. Persentase peran komite sekolah peritem dilihat dari gambar 6. Persentase item 1 (M1) sebesar 79,67% dengan kategori baik. Persentase item 2 (M2) sebesar 79,67% dengan kategori baik. Persentase item 3 (M3) sebesar 58,61% dengan kategori cukup baik. Persentase item 4 (M4) sebesar 58,69% dengan kategori cukup baik. Persentase item 5 (M5) sebesar 59,18% dengan kategori cukup baik. Persentase item 6 (M6) sebesar 67,27% dengan kategori baik. Persentase item 7 (M6) sebesar 59,43% dengan kategori cukup baik. Persentase item 8 (M7) sebesar 70,78% dengan kategori baik. Dari kedelapan item tersebut didapatkan rata-rata persentase peran komite sekolah sebagai *mediator agency* sebesar 66,66% dalam kategori baik.

Persentase tertinggi dari peran komite sekolah sebagai *mediator agency* terletak pada item M1 dan M2 yaitu komite sekolah membina hubungan dengan seluruh *stakeholder* sekolah dan komite sekolah membina kerjasama harmonis dengan seluruh *stakeholder* sekolah, dan persentase terendah pada item M3 yaitu komite sekolah mengadakan peninjauan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan MOU dengan berbagai lembaga. Kedua item ini berada pada kategori baik dan cukup baik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah sebagai *mediator agency* memiliki implementasi peran dan tugas yang baik di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota.

Pembahasan

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *advisator agency* di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota telah berjalan dengan baik. Komite sekolah dianggap sebagai rekan kerja kepala sekolah yang dapat berkolaborasi dalam menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Mereka juga berperan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan oleh sekolah.

Dalam konteks ini, penting untuk membangun saling pengertian dan komunikasi yang baik antara sekolah dan komite sekolah. Dukungan komite kepala sekolah terhadap program-program dan kebijakan yang dihasilkan oleh komite sekolah menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Komunikasi yang sehat dan saling memahami

antara sekolah dan komite sekolah adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Sagala, 2016).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriana, Isnaini, & Syarifuddin, 1970), yang menyatakan bahwa komite sekolah telah melaksanakan tugas dan peran mereka dengan baik sebagai badan pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan di sekolah.

Hasil kedua yang dicapai adalah implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *supporting agency* memiliki peran yang baik di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota. Komite sekolah sebagai pendukung dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sekolah. Wujud peran atau dukungan komite sekolah dapat berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada data hasil persentase item terendah dari peran komite sekolah sebagai *supporting agency* yaitu pada item komite sekolah mengadakan rapat rutin dengan masyarakat. (Adilah & Suryana, 2021) keterlibatan masyarakat maupun orang tua sangat tinggi dalam hal memantau kualitas sekolah. Dengan hal ini, tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga pendidikan saja, namun diperlukan dukungan berbagai pihak termasuk keluarga, masyarakat, dan dunia industri/usaha untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai program pendidikan. (Febriana et al., 1970) juga menyatakan bahwa peran serta masyarakat sangatlah utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu faktor *support* tercapainya pendidikan masyarakat.

Hasil ketiga yang dicapai adalah implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *controlling agency* memiliki peran yang baik di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota. Peran komite sekolah sebagai *controlling agency* dimaksudkan agar komite sekolah sebagai rekan kerja kepa sekolah bisa memberikan pengawasan terhadap program kerja sekolah dan penembahan fasilitas sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai *controlling agency*, komite sekolah bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mengawasi pelaksanaan program-program sekolah serta penggunaan fasilitas dengan efektif dan efisien. Mereka memastikan bahwa program-program yang telah

ditetapkan oleh komite sekolah bersama kepala sekolah dapat dilaksanakan dengan baik, dan fasilitas sekolah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan yang optimal.

Hasil keempat yang dicapai adalah implementasi peran dan tugas komite sekolah sebagai *mediator agency* memiliki peran yang baik di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota. Dalam hal ini komite sekolah berperan sebagai penghubung dalam menyampaikan aspirasi orang tua dan masyarakat terhadap pihak sekolah dan turut memasyarakatkan kebijakan sekolah.

Sebagai *mediator agency*, komite sekolah bertindak sebagai penghubung antara sekolah dan stakeholder eksternal, seperti orang tua dan masyarakat. Mereka mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka, kemudian menyampaikannya kepada pihak sekolah. Selain itu, komite sekolah juga berperan dalam memasyarakatkan kebijakan sekolah, sehingga orang tua dan masyarakat dapat memahami dan terlibat aktif dalam proses pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya peran komite sekolah sebagai *mediator agency* dalam menciptakan keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat serta memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas.

Dalam penelitian ini, bisa dilihat bahwa hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan bahwa komite sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota sangat berperan baik sebagai pemberi pertimbangan (*advisor agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol/pengawas (*controlling agency*), dan sebagai mediator (*mediator agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Limapuluh Kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota memiliki peran yang kuat dan beragam dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Komite sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pertimbangan (*advisor agency*), tetapi juga sebagai pendukung (*supporting agency*), pengontrol/pengawas (*controlling agency*), dan mediator (*mediator agency*).

Sebagai pemberi pertimbangan, komite sekolah memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam pengambilan keputusan terkait program dan kebijakan pendidikan. Mereka juga berperan sebagai pendukung, dengan memberikan dukungan moral dan material untuk mendukung kegiatan sekolah dan peningkatan fasilitas pendidikan.

Pada permasalahan ini komite juga dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dan juga alat komunikasi guna memperkuat Kerjasama antara komite, pihak sekolah, dan juga orang tua siswa. Selain itu dari hasil penelitian komite dapat mengetahui inklusivitas dan memahami keberagaman dalam komunitas sekolah. Penelitian ini juga berdampak pada pengembangan karakter siswa disamping aspek akademik, dan menguatkan peran komite dalam pengelolaan krisis dan perubahan seperti transisi kepemimpinan sekolah.

Dalam penelitian ini, hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa komite sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Limapuluh Kota berhasil menjalankan peran mereka dengan baik dalam semua aspek tersebut. Kontribusi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut sangat berarti dan memberikan dampak yang positif.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dianalisis dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi peran dan tugas komite sekolah se-Kabupaten Limapuluh Kota sudah baik sebagai *advisor agency*, *suporting agency*, *controlling agency*, dan *mediator agency*. Rata-rata persentase keempat peran komite sekolah tersebut adalah 73,61% yang termasuk dalam kategori baik. Berikut beberapa kesimpulan masing-masing peran dan tugas dari komite sekolah:

1. Komite sekolah memiliki peranan yang baik sebesar 75,33% sebagai pemberi saran dan pertimbangan serta dalam penentuan kebijakan pendidikan (*advisor agency*) di SMA Negeri Kabupaten Limapuluh Kota.
2. Komite sekolah memiliki peranan yang baik sebesar 74,63% dalam mengumpulkan dana dan sumber daya dibidang pendidikan (*supporting agency*) di SMA Negeri Kabupaten Limapuluh Kota.
3. Komite sekolah memiliki peranan yang baik sebesar 72,81% dalam mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah (*controlling agency*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di SMA Negeri Kabupaten Limapuluh Kota.
4. Komite sekolah memiliki peranan yang baik sebesar 66,66% dalam melakukan tindak lanjut menampung aspirasi, saran, dan kritik dari semua warga sekolah dan hasil pemantauan komite sekolah terhadap kinerja sekolah (*mediator agency*) di SMA Negeri Kabupaten Limapuluh Kota.

DAFTAR RUJUKAN

- Adilah, H. G., & Suryana, Y. (2021). Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 6(1), 87–94.
- Arikunto, S. (2009). Manajemen Penelitian: Jakarta: Rineka Cipta. *Anjaryani, Wd.*
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (*No Title*).
- Asmani, J. M. (2012). Tips sakti membangun organisasi sekolah. *Jakarta: DivaPress.*
- Azwar, S. (2019). *Reliabilitas dan validitas.*
- Bandur, D. B. (n.d.). A.(2020). *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Dilengkapi Analisis Dengan NVIVO, SPSS, Dan AMOS (Asli). Penerbit Mita Wacana Media.*
- Febriana, L., Isnaini, M., & Syarifuddin, A. (1970). PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 PALEMBANG. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 1(2), 152–163. <https://doi.org/10.19109/pairf.v1i2.3234>
- Gorton, R. A. (1976). *School Administration: Challenge and Opportunity for Leadership.*
- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2018). Paradigma Islam Dalam Metodologi Penelitian Dan Implikasinya Terhadap Penelitian Pendidikan Agama Islam. *Tadrib*, 4(2), 225–245.
- Indonesia, U.-U. R. (2003). Sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.*
- Kadir, K., & Pd, M. (2016). Statistika Terapan: Konsep, Contoh, dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian. *Edisi Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.*
- Kania, R., & Davis, R. (2018). *Managing criminal justice organizations: An introduction to theory and practice.* Routledge.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung.*
- Mahmud, D. H., & Si, M. (2011). Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: CV. *Pustaka Setia.*
- Nasional, I. D. P. (2003). *Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.*
- Nasution, I. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Komite Sekolah.* Jakarta: GP Press.
- Rohiat, R., & Pd, M. (2010). Manajemen sekolah: Teori dasar dan praktik. *Bandung: Refika Aditama.*
- Sagala, S. (2016). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan.*
- Shaleh, A. R. (2008). *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam.*
- Simanjuntak, M. V., Maesaroh, M., & Santoso, S. (2014). Evaluasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Evaluasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Penyandang Cacat dan Kelainan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 160–167.

- Siregar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*.
- Sukmadinata, N. S. (2019). *Landasan psikologi proses pendidikan*.
- Thalib, S. B. (2017). *Psikologi pendidikan berbasis analisis empiris aplikatif*. Prenada Media.
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Rineka Cipta.
- Vianora, W., Marsidin, S., & Hendriani, S. (2021). The Role of School Committee Management in Improving Student Discipline During the Covid-19 Period at MTsN 6 Tanah Datar. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 62. <https://doi.org/10.31958/jaf.v9i2.4150>